

ANGK. M. 2440. 15. 000. 00
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BLT DANA DESA SEBAGAI
JARING PENGAMAN SOSIAL DI DESA PAKATTO KECAMATAN
BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA**



Disusun oleh:

ANDI MUHAMMAD ISHAQ

Nomor Stambuk : 10564113817

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	
LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Terima	09-09-2022
Nomor Surat	
Jumlah	
Harga	
Nomor	
No. Klasifikasi	R/0105/PM/22 CD
	AND
	C.

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Evaluasi Kebijakan Program BLT Dana Dana Desa
Sebagai Jaring Pengaman Sosial Di Desa Pakatto
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

Nama : Andi Muhammad Ishaq

Nim : 105641113817

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui
Pembimbing I Pembimbing II

Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I

A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

Mengetahui

Dekan Fisip

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Peguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan meguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 065/FSP/A.4-II/VIII/4A/2022 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2022.

TIM PENILAI

Ketua



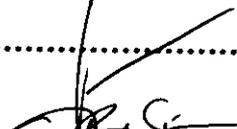
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

Penguji :

1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (**Ketua**)  (.....)
2. Dr. Abdi, M.Pd  (.....)
3. Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si  (.....)
4. Muhammad Randhy Akbar , S.IP., M.Si  (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Muhammad Ishaq

Nomor Stambuk : 105641113817

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya Ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/ di publikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 25 Juli 2022

Yang menyatakan



Andi Muhammad Ishaq

ABSTRAK

Andi Muhammad Ishaq 2022. Evaluasi Kebijakan Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dibimbing oleh, Ahmad Harakan dan A. Luhur Prianto

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sudah menjadi tradisi ilmiah sebagai metode penelitian bidang ilmu sosial budaya, psikologi, dan Pendidikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Evaluasi Program BLT-Dana Desa sudah meringankan beban masyarakat, maka dari itu kriteria efektivitas dalam teori evaluasi milik Dunn sudah mencapai tujuan yang diharapkan, Efisiensi Tindakan pemerintah desa agar mencapai tujuan adalah dengan mengalokasikan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kemudian disalurkan ke dana desa.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur senantiasa saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT, oleh karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Dan demikian pula tidak lupa kita kirimkan salam serta sholawat kepada baginda rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh dan panutan bagi kita semua. Dengan segala nikmat dan keyainan ini Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa** ”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini tidak lupa Penulis menghanturkan Terima Kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Andi Mukaddas dan ibunda Andi Ramlah ,selaku orang tua, terima kasih atas segala bentuk cinta,, doa dan pengorbanannya.
2. Ayahanda Ahmad Harakan S.IP., M.H.I selaku pembimbing I dan ayahanda Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan,arahan serta petunjuk dalam menyempurnakan skripsi ini..
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ayahanda Ahmad Harakan S.IP., M.H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh dosen ilmu pemerintahan yang senantiasa memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ,berbagi pengalaman serta petunjuk dan arahan yang telah di berikan.
7. Keluarga besar dan sahabat yang banyak memberikan motivasi serta semangat dalam penyelesaian ini.
8. Seluruh kalangan yang telah membantu saya dalam tahap penyelesaian skripsi ini, terkhusus dinas Pemerintah Desa Pakatto yang telah memberikan izin meneliti. Semoga segala bentuk kebaikan dan bimbingannya mendapat balasan di sisi Allah SWT.
9. Teruntuk Juga Teman Teman Jalur Irit Kakanda Dina Firdaus, Kanda Almaidah Usman, Kakanda Syarif Hidayatullah, Kakanda Ahmad Nurdani, Kakanda Syahrul Ramadhan dan Kakanda Firyal Magfira, terimakasih banyak atas pengawalannya selama ini yang tiada hentinya memberikan semangat.
10. Terimakasih juga untuk kaka Niswar Abrar yang telah menemani dan sabar mengajarkan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan merelakan materi dan waktunya.
11. Terimakasih Juga Buat Bang Iccang, Kak Ari, Muhammad Adhe dan

saudara-saudara saya yang belum bisa saya sebut Namanya saya ucapkan beribu-ribu terimakasih atas arahan dan pengawalannya, yang rela berkorban materi dan waktunya.

12. Terimakasih Buat *Spotify, Youtube, Tiktok, Instagram, dan Twitter*, Terutama buat *JKT48, New Found Glory, Neck Deep, Fall Out Boy, Paramore, Blink-128, Simple Plan, Good Charlotte*, dan masih banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan satu persatu.

Selaku penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangannya. oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak penulis sangat mengharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, Agustus 2022
Penulis,

ANDI MUHAMMAD ISHAQ

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Kebijakan dan Teori Evaluasi Kebijakan.....	7
B. Program Bantuan Langsung Tunai.....	13
C. Penelitian Terdahulu	15
D. Kerangka berfikir	18
E. Fokus Penelitian.....	21
F. Deskripsi Fokus Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	23
C. Sumber Data.....	24
D. Informan Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	30
B. Sturuktur Organisasi Pemerintah Desa Pakatto.....	39
C. Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa	

Pakatto	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 sejak ditemukan menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Hingga pada bulan Maret 2020 virus ini pertama kali menyebar di Indonesia dan menyebabkan turunnya roda perekonomian di Indonesia karena meningkatnya pengangguran yang disebabkan banyaknya karyawan yang dilakukan Pemutusan Hubungan massal dari perusahaan (Amri, 2021).

Salah satu langkah yang diambil oleh beberapa perusahaan di Indonesia yaitu harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para karyawan yang berkerja di Perusahaan tersebut. Beberapa Perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dimasa pandemi Covid-19 ini seringkali menggunakan alasan *force Majeure*, atau perusahaan yang terbilang mengalami penurunan atau kerugian selama pandemi ini (Juaningsih, 2020) maka dari itu pemerintah harus dengan sigap membuat kebijakan – kebijakan untuk mengatasi dampak dari pandemi ini, salah satu kebijakannya adalah BTL DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa). Di harapkan dengan adanya program BTL-DD ini dapat cukup membantu masyarakat yang terdampak karena pandemi Covid-19, terutama karyawan atau buruh yang di PHK oleh perusahaan mereka yang rata-rata tidak mampu membeli kebutuhan rumah tangga yang layak dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga agar dapat bertahan hidup selama pandemi ini dan juga diharapkan mampu memberi layanan sosial kepada semua warga desa yang

membutuhkan. Dana desa merupakan Alokasi anggaran *on budget* yang dapat di gunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi tidak memerlukan sistem yang ada dapat di arahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintahan desa melalui penyelesaian masalah secara lokal serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas (Abror, 2021).

Pemerintah dalam melaksanakan program ini harus tepat sasaran dan harus peka terhadap berbagai permasalahan serta kebutuhan masyarakat, bersifat terbuka sehingga dengan mudah dapat ditinjau dan diketahui oleh berbagai pihak, termasuk oleh warga masyarakat. Dari beberapa permasalahan tersebut pemerintah memutuskan untuk menerapkan kembali kebijakan BLT-DD (Nasdian, 2014).

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat yang kemudian diturunkan kepada pemerintah daerah wilayah siaga Covid-19, memiliki tugas membagikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19 dan mempersiapkan dana talangan sosial untuk warga masyarakat tentang bahaya Covid-19 dan mempersiapkan dana untuk mengaman sosial ini seperti dana desa yang dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun yang membuat bimbang merupakan pada kriteria BLT dimana dalam point 1 terdapat kriteria miskin

namun bukan sebab akibat Covid-19, serta pada point ke-7 terdapat yang tidak boleh menerima dorongan BLT dari dana desa ialah yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi serta pusat, dan lainnya (Mufida, 2020).

BLT-DD adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak Covid-19 yang merupakan JPS bagi masyarakat yang berupa bantuan uang tunai 300 Ribu Rupiah setiap per KK BLT- Dana Desa ini bebas pajak. JPS merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak, dengan menggunakan sumber pembiayaan dari pemerintah desa dan masyarakat atau Dana Desa.

Hasil dari Observasi terkait penanganan Program BLT penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa dimana pemerintah menyiapkan anggaran yang tidak terduga sebesar 500 juta Rupiah sebagai langkah untuk menyiapkan sembako bagi masyarakat yang terkonfirmasi PDP, ODP dan yang positif terpapar Covid-19 selama masa isolasi (Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa 2021). Selain itu melalui pemerintahan Gowa dalam hal ini Bupati memberikan intruksi kepada setiap desa agar memasang himbuan kepada masyarakat agar senantiasa memakai masker. Kemudian bagi para pelaku usaha tetap dapat menjajahkan usahanya namun tetap mematuhi protokol kesehatan.

Pemerintah Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam pencairan BLT jumlah penerima pada tahun 2020 sebanyak 68 kepala keluarga setiap KK mendapat bantuan sebesar Rp300 Ribu untuk tahap pertama dan sembako. pencairan BLT-DD ini berjalan lancar, dan pada tahun 2021

pencairan BLT untuk tahap ke tiga berjalan lancar dengan jumlah penerima BLT mencapai 128 kepala keluarga mengapa demikian, dikarenakan KK yang telah mendapatkan bantuan untuk pertama kali akan mendapatkan Rp300 ribu rupiah, dan untuk tahap kedua dan ketiga akan mendapatkan Rp300 Ribu Rupiah (Chibernews.com 2021).

Dana Desa adalah alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung sebagai upaya mengurangi dampak covid-19 di tingkat rumah tangga dan Desa (Maun, 2020). Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, masih ditemukan permasalahan dalam Program BLT-Dana Desa ini yang tidak sesuai ekspektasi kebijakan Pemerintah yang jelas tertulis bahwa bantuan ini diberikan tepat waktu selama 2 tahap dan masing-masing tahap dibagi menjadi empat bulan atau 4 kali menerima bantuan. Sebagian masyarakat mengeluh bahwa BLT-Dana Desa ini lambat di terima, maka dari itu dengan adanya permasalahannya ini maka saya tertarik untuk meneliti program ini secara mendalam agar mendapatkan solusi yang diderita oleh masyarakat dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial Di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas maka dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

D. Manfaat penelitian

Tulisan ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis bagaimana Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Melalui teknologi informasi, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan menjadi referensi bagi Pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam evaluasi kebijakan program BLT dana desa di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu dan juga untuk masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini Memberikan Pengaruh baik untuk Pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam evaluasi kebijakan program BLT dana desa di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu dan juga untuk masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan dan Teori Evaluasi Kebijakan

1. Kebijakan

Definisi dari kebijakan adalah sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak aktor-aktor sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Dalam organisasi penetapan kebijakan suatu faktor yang sangat penting untuk sampai pada tujuan (Ramadhani, 2016). Lebih lanjut. Kebijakan memiliki dua aspek yakni :

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, bijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, bijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi dimasyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas kejadian yang terjadi, untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan Bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasipnal atas usaha Bersama tersebut dengan demikian kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan

dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramadhani, 2016).

2. Teori dan Proses Kebijakan

Proses Kebijakan dapat digambarkan sebagai suatu sistem yaitu ada input, proses dan output. Input daripada proses kebijakan adalah isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berupa perumusan formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan berupa perumusan formulasi kebijakan dan plementasi kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan merupakan proses politik yang dilakukan elit politik dan kelompok-kelompok penekan. Sementara output dari suatu proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Bakry, 2010).

Teori dan proses kebijakan memiliki definisi yang tidak hanya merelakan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, akan tetap mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perhatian para ilmuwan politik terhadap studi kebijakan publik juga semakin besar. Menurut James Anderson, adalah sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah ataupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan dengan baik. Sifat dari kebijakan publik sebagai arah tindakan yang dapat dipahamu secara lebih bai kapa bila konsep ini diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan,

dampak kebijakan, dengan mengacu pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan Jones dan beberapa ahli lainnya, dominan kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik dan ajuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahapan-tahapan perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan juga berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, dapat di analisis pembentukan substansi, dan dampak dari kebijakan tertentu (Anggara, 2014).

Setiap produk kebijakan haruslah mengamati dan memperhatikan substansi dari keadaan sasaran. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli. Dimana lebih jauh menjelaskan sebagai berikut. :

- a. Kebijakan harus dibedakan menjadi keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni:
 - 1.) Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari keputusan.
 - 2.) Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan.
 - 3.) Kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu kelompok dan organisasi.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi

mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintah sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara top-down dengan bottom-up menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistis.

- c. Kebijakan sebenarnya tidak serta-merta dapat dibedakan menjadi Administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara adalah perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan.

3. Evaluasi kebijakan

Secara Umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan menurut Anderson (2012: 229) suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan mencakup substansi, implementasi dan dampak. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dan dilaksanakan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya

(Hasbullah, 2019)

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan *alternative* yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. (William Dunn, 2003). Menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Yang dimaksud efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik. Agar masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat di atasi dengan baik.

b. Efisiensi

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menentukan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Untuk efisiensi kebijakan tersebut dapat di ukur menjadi tiga indikator : Dari segi biaya, dari segi waktu, dan dari segi tenaga.

c. Responsivitas

Yang dimaksud responsivitas adalah berkenan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai

kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

d. Kecukupan

Kecukupan merupakan alat ukur seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

e. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai keadilan yang merata dan diperoleh oleh sasaran kebijakan.

B. Program Bantuan Langsung Tunai

Menurut (Carly, 2020). Program bantuan langsung tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga kluster. Program bantuan langsung tunai termasuk dalam kluster 1, yaitu program bantuan dan perlindungan sosial. Termasuk dalam kluster 1 adalah program beras miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), program jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan program Beasiswa.

Menurut (Carly, 2020) selain melaksanakan kluster 1, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengetasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam kluster 2 yaitu program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam kluster 2 ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP) dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan Kluster 3 yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaga Rakyat (KUR).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditunjukkan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. (Pramanik, 2020).

Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada factor produksi, peluang/kesempatan bersuaha, Pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya pemertahanan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak, tujuan BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah Penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial Bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat sosial: Memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 Triliun. Program BLT Bagi 12,3 Juta Kepala Keluarga (KK) yang terdampak covid-19 yang di serahkan oleh kepala desa dan perangkat Desa.

Masing-masing akan mendapatkan Rp600 Ribu Selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 Juta. Alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa.

1. Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp800 Juta, BLT dialokasikan 25 Persen;
 2. Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 Juta - Rp1,2 Milyar BLT dialokasikan 30 Persen ;
 3. Desa yang memiliki Dana Desa di atas Rp1,2 Milyar, BLT dialokasikan 35 persen ;
- Menurut (Carly, 2020).

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang akan penulis lakukan berjudul “Evaluasi Kebijakan Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.” Adapun kesamaan tema yang penulis baca sebelumnya yaitu sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Dewa, 2011)	Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu priode 2008-2009 sudah berjalan baik mencapai

			66% pemerataan dari angka di hipotesis kan 65%.
2.	(Wibawani, 2021)	Evaluasi Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosia di Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.	Hasil penelitian ini BLT-Dana Desa sudah meringankan beban masyarakat, maka dari itu kriteria efektivitas dalam teori evaluasi milik Dunn sudah mencapai tujuan yang diharapkan efisiensi tindakan pemerintah desa agar mencapai tujuan adalah dengan mengalokasikan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kemudian disalurkan ke Dana Desa.
3.	(Lubis, 2007)	Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan	Hasil penelitian ini untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, tentang pelaksanaan Bantuan Lansung Tunai Kepada rumah tangga miskin, Pemerintah meluncurkan program ini yang dirancang untuk membantu mengurangi beban rumah tangga miskin sebagai akibat dari kebijakan pemerintah.

Ketiga Penelitian terdahulu ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian ini yakni metode penelitian Kualitatif, judul ini sama sama membahas Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai, sementara perbedaan dalam ketiga penelitian ini objek penelitian yang akan peneliti lakukan.

Tinjauan Pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Dari ketiga penelitian ini yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yakni bagaimana Evaluasi kebijakan program bantuan Langsung Tunai dana desa sebagai jaring pengaman sosial di sebuah desa yang membawa perubahan secara nyata. Bukan

hanya teori dan konsep di dalam mengevaluasi kebijakan BLT dana desa, hambatan dan keunggulan didalam program tersebut. Dari tiga tinjauan pustaka yang peneliti gunakan sebagai pembandingan dan bahan acuan dalam melakukan penelitiannya nantinya.

D. Kerangka berfikir

Evaluasi Kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan (Sumodiningrat, 1999). Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Maka dari itu penelitian ini menggunakan teori dari (William D. Dunn, 2003) sebagai parameter untuk mengevaluasi kebijakan program blt dana desa yang mencakup lima indikator Efektifitas, Efisiensi, Kecakupan, Responsivitas dan Pemerataan

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan, program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Jadi pelaku yang terlibat dalam evaluasi kebijakan program BLT dana desa, memahami evaluasi kebijakan tidak hanya sebatas memahami sistem evaluasi kebijakan dan mampu menjawab tantangan yang akan di hadapi dimasa depan, pada awal tahun 2020 sebuah virus yang sangat berbahaya yaitu virus covid-19 yang menyerang manusia diseluruh

negara. tidak terkecuali Indonesia dimana virus tersebut juga sampai ke Sulawesi Selatan, dimana dampak dari virus tersebut membuat pemerintah membuat kebijakan program Bantuan Langsung Tunai dari dana desa.

Evaluasi Kebijakan Program BLT Dana
Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di
Desa Pakatto Kecamatan Bonto Marannu
Kabupaten Gowa

Evaluasi Kebijakan
(Anggara. S 2014)

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Responsivitas
4. Kecukupan
5. Pemerataan

Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring
Pengaman Sosial

E. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian yang telah di uraikan oleh peneliti kemudian akan di deskripsikan dengan menggunakan 5 indikator sebagai berikut.

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. William Dunn Menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Yang dimaksud efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang di inginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai- nilai yang di inginkan sampai kepada publik. Agar masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat di atasi dengan baik.

b. Efisiensi

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan

untuk menentukan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Untuk efisiensi kebijakan tersebut dapat diukur menjadi tiga indikator : Dari segi biaya, dari segi waktu, dan dari segi tenaga.

c. Responsivitas

Yang dimaksud responsivitas adalah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

d. Kecukupan

Kecukupan adalah merupakan alat ukur seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, mencukupkan nilai dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

e. Pemerataan

Pemerataan adalah dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai keadilan yang merata dan diperoleh oleh sasaran kebijakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa” Penelitian ini akan dilakukan pada waktu selama dua (2) bulan setelah seminar proposal. Dan lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Gowa mengenai Evaluasi Kebijakan Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakattor Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Adapun juga alasan memilih objek lokasi penelitian tersebut karna menjadi lokasi penelitian tentang pentingnya untuk mengetahui Evaluasi kebijakan Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa terhadap Masyarakat Kabupaten Gowa.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalahh :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong P. , 2019).

Dalam Penelitian yang dilakukan antara lain melakukan pengamatan

terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami Bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terlibat langsung kelapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti terkait Evaluasi Kebijakan Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini memperoleh data yang di perlukan melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data Primer Merupakan sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan focus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Merupakan Sumber data Pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan halini dilakukan sebagai upaya Penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Adapun Teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang Evaluasi Kebijakan Program BLT Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Adapun yang akan di jadikan informan penelitian ini adalah:

No	Informan	Jabatan
1	Basir	Kepala Desa
2	Muyuti S.Pd	Sekretaris Desa
3	Dg. Genta	Buruh Harian
4	Dg. Aksa	Penjual Nasi Kuning
5	Dg. Januardi	Masyarakat Desa

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Memperoleh data yang relevan penelitian, penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yakni:

1. Teknik observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah yang terkait dalam Evaluasi Kebijakan Program BTL Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap berbagai informan Kepala Desa Pakatto, Aparatur desa, Masyarakat yang terdampak BLT Dana Desa, dan

Masyarakat yang tidak terdampak atau mendapat BTL Dana Desa.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan Pengumpulan data melalui dokumen atau buku-buku hasil-hasil penelitian yang relevan yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan temua hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan menuntun kita kearah temuan alamiah bila dianalisis. Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data hasil peneltian menjadi data dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 koponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam (Moleong P. , 2019) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan

fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

Menurut (Moleong P. , 2019) Untuk menetapkan Keabsahan Data diperlukan Teknik pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan memiliki sejumlah kriteria meliputi kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kepercayaan (credibility) data yang dilakukan dengan Teknik triangulasi. Triangulasi Merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga trigulasi dalam keabsahan yaitu triangulasi sumber, triangulasi Teknik , dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan Teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

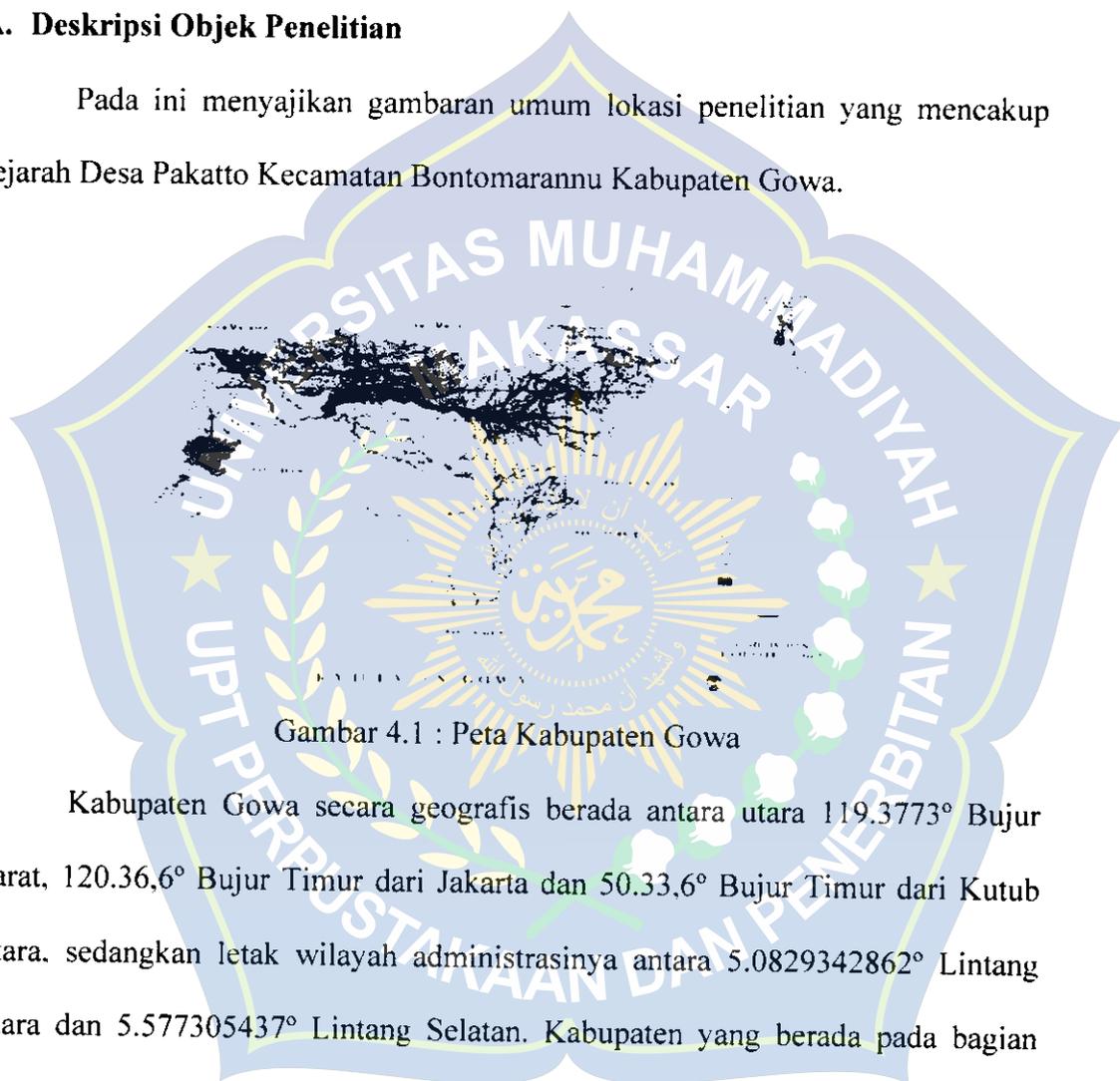
Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup sejarah Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.



Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa secara geografis berada antara utara 119.3773° Bujur Barat, $120.36,6^{\circ}$ Bujur Timur dari Jakarta dan $50.33,6^{\circ}$ Bujur Timur dari Kutub Utara, sedangkan letak wilayah administrasinya antara 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada pada bagian selatan provinsi Sulawesi selatan ini berbatas dengan 7 Kabupaten/kota lain, yaitu: Utara: Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, Selatan: Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto, Barat: Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, Timur: Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dan 167

desa/kelurahan dengan luas daerah sekitar 1.883,33 kilo meter persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulo dan Biringbulu. Berikut tabel di bawah ini mengenai luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Gowa 2020.

Table 4.1
Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa 2020

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Bontonompo	Tamallayang	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	19,04	1,01
5.	Pallangga	Mangalli	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	20,67	1,1
7.	Sombaopu	Sungguminasa	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borongloe	52,63	2,8
9.	Pattalassang	Pattalassang	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	221,26	11,75
11.	Manuju	Moncongloe	91,9	4,88
12.	Tinggimoncong	Malino	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	Tamaona	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	132,76	7,05
15.	Bungaya	Sapaya	175,53	9,32
16.	Bontolempangan	Bontoloe	142,46	7,56
17.	Tompobulu	Malakaji	132,54	7,04
18.	Biringbulu	Lauwa	218,84	11,62
GOWA			1 883,33	100,00

Sumber : Gowa dalam Angka, 2019

Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 – 2800 m diatas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen terutama di bagian timur hingga selatan karena

merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng – Lompobattang dan Pegunungan Batureppe - Cindako.

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 Kmpersegi dengan panjang sungai utama 90 kilometer.

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen atau terdapat 9 kecamatan yang merupakan dataran tinggi. Oleh karena itu, jarak antara wilayah kecamatan dengan ibukota kabupaten relatif jauh. Jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Biringbulu yang menempuh jarak 140 Km dan Kecamatan Bontolempangan dengan jarak 120 Km yang harus melewati Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar. Sedangkan jarak terdekat adalah Kecamatan Pallangga yang hanya menempuh 2,45 Km dan Kecamatan Bontomarannu dengan jarak 9 kilometer. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Gowa tercatat sejumlah 691.309 jiwa yang terdiri dari 339.575 laki-laki dan 351.734 perempuan.

Pada tahun 1965 saat masih sistem distrik, Desa Pakatto bernama Distrik Borongroe. Selanjutnya pada tahun 1973 berubah nama menjadi Lingkungan Pakatto. Dan berubah menjadi Desa Pakatto pada tahun 1990 yang saat itu Lingkungan Pakatto terbagi menjadi dua yaitu Desa Pakatto dan Desa Nirannuang.

1. Keadaan Geografis



Gambar 4.2 Peta Desa Pakatto

Desa Pakatto memiliki luas wilayah desa $\pm 6,71$ HA. Desa Pakatto merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Marannu yang terletak dibagian selatan Kabupaten Gowa. Jarak dari ibu kota Kabupaten Gowa ± 11 KM, dari ibu kota kabupaten 23 KM dan dari Ibu Kota Kecamatan 2 KM. Desa Pakatto terbagi atas empat dusun yakni Pakatto Caddi, Pakatto Lompo, Parang Carammeng dan Lantebung. Adapun batas-batas wilayah Desa Pakatto adalah sebagai berikut:

Di sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Timbuseng Kecamatan Pattallasang

- a. Di sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Mataallo dan Desa Sokolia
- b. Di sebelah Barat, berbatasan dengan Kelurahan Bontomanai
- c. Di sebelah Timur, berbatasan dengan Nirannuang.

Iklim Desa Pakkatto pada umumnya memiliki suhu rata-rata berkisar antara 22°C sampai 35°C. Curah hujan terbilang sedang dan terdapat 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai Februari dan musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai November.

Pembagian wilayah Desa Pakatto berdasarkan RT/RW adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Dusun Pakatto Caddi terdapat 3 RW dan 9 RT
- b. Wilayah Dusun Pakatto Lompo terdapat 3 RW dan 6 RT
- c. Wilayah Dusun Lantebung terdapat 3 RW dan 6 RT
- d. Wilayah Dusun Parang Carammeng 3 RW dan 6 RT

2. Karakteristik dan penduduk Desa Pakatto

Desa Pakkatto merupakan kawasan daratan rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan. Sehingga mata pencaharian dari sebagian besar warga Desa Pakkatto adalah Petani. Sedangkan mata pencaharian lainnya adalah wiraswasta, pengusaha, buruh lepas dan lain-lain.

Berikut tabel-tabel jumlah penduduk dan mata pencahariannya:

a. Tabel Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
1	2.722	2.749	5.471

Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Pakatto Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Tabel data Penduduk Perdesun berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Nama Dusun				Total
		Pakatto Caddi	Pakatto Lompo	Parang Carammeng	Lantebung	
1	Laki-Laki	1.061	585	419	657	2.722
2	Perempuan	1.029	628	454	638	2.749
	Jumlah	2.090	1.210	873	1.295	5.471

Tabel 4.2 Data Penduduk Perdesun Desa Pakatto Berdasarkan Jenis Kelamin

c. Tabel data Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Mata Pencaharian	Nama Dusun				Total
		Pakatto Lompo	Pakatto Caddi	Parang Carammeng	Lantebung	
1	Petani	102	166	47	96	411
2	PNS	45	12	1	7	65
3	Honorar	17	13	4	6	40
4	TNI/POLRI	15	5	2	13	35
5	Tukang Batu	36	40	35	33	144
6	Pedagang	22	10	3	38	73
7	Buruh Lepas	79	48	28	65	220
8	Tukang Kayu	1	5	5	1	12
9	Sopir	39	39	21	26	125
10	Pengusaha	3	1	1	5	10

11	Wiraswasta	103	63	5	37	208
12	Karyawan Swasta	122	77	35	56	290
	Jumlah	584	479	187	383	1.633

Tabel 4.3 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Pakatto 2021.

3. Organisasi Pemerintahan Desa Pakatto

Perencanaan Pemerintah Desa memiliki visi dan misi guna mengarahkan desa ke tujuan perkembangan desa. Visi Pemerintah Desa Pakatto adalah mewujudkan Desa Pakatto yang sejahtera dan inklusif ditunjang sumber daya manusia yang berkualitas. Sejahtera dimaksudkan yaitu cita-cita perwujudan masyarakat Desa Pakatto yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder. Inklusif ialah desa yang masyarakatnya terbuka universal, saling menghargai dan menghormati segala bentuk perbedaan, dimana setiap masyarakat tanpa diskriminasi dapat berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya, sehingga setiap masyarakat berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, status sosial dan kebutuhan yang berbeda dapat menikmati kesejahteraan yang layak. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang komprehensif dalam berpikir dan bertindak.

Adapun misi dari Pemerintah Desa Pakatto sebagai berikut:

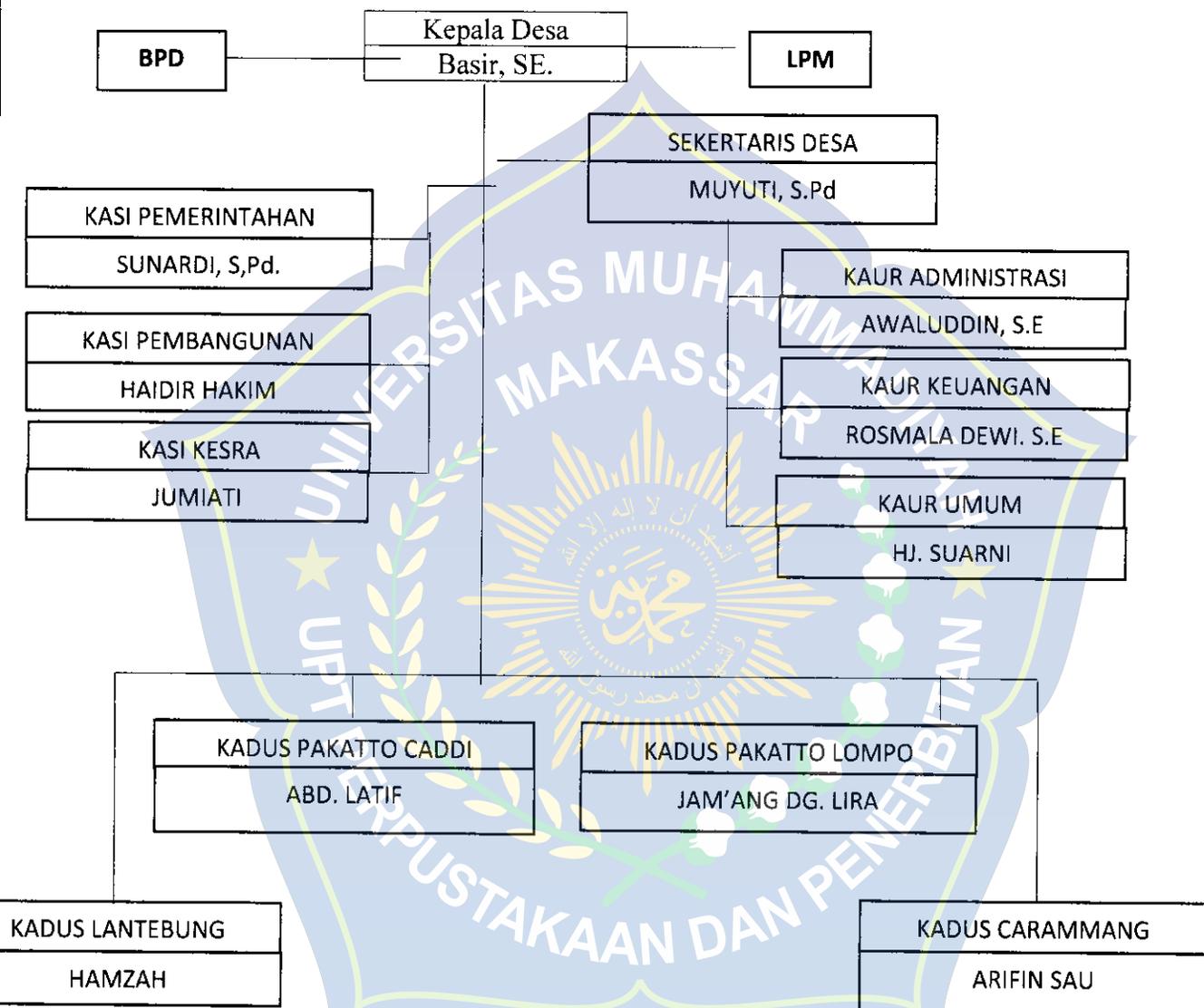
- a. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang aksesibilitas;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur formal dan non-formal;

- c. Membangun dan mendorong pembangunan usaha ekonomi yang berbasis potensi lokal;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas religius.

Desa Pakkatto juga memiliki kebijakan pimpinan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan administrasi pelayanan masyarakat.
- b. Pengembangan sumber daya manusia perangkat desa.
- c. Disiplin waktu.
- d. Tertib administrasi.
- e. Keamanan dokumen.
- f. Peka terhadap perubahan lingkungan dan melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan.
- g. Melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan.

B. Struktur Aparat dari Pemerintah Desa Pakatto



Upaya Pemerintah Desa dalam membangun Desa Pakkatto tidak lepas dengan campur tangan BPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 10 BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jadi setiap masukan atau saran dan keluhan masyarakat akan ditampung oleh BPD dan akan disampaikan ke pihak aparat desa. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 2 yang berbunyi:

“BPD berkedudukan sebagai wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis”

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 3 membahas fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

C. Hasil penelitian Evaluasi kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94 Tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dana desa dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Pemberian Uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.

Tujuan Pelaksanaan BLT Dana Desa adalah dalam rangka membantu

masyarakat miskin terdampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat agar tetap bisa bertahan hidup di era pandemi COVID-19 ini yang dimana masyarakat yang terdampak juga di harapkan mampu memberi layanan sosial kepada seluruh warga desa yang membutuhkan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulannya untuk keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Program BLT Dana Desa ini Bebas dari pajak.

Pada Program BLT Dana Desa, masih ditemukan permasalahan dalam program ini yaitu ketidaksesuaian ekspektasi kebijakan pemerintah yang jelas tertulis bahwa bantuan ini diberikan tepat waktu selama 2 tahap dan masing-masing dibagi menjadi 3 bulan atau 3 kali menerima bantuan, maka dari itu mengevaluasi suatu program atau kebijakan diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut berikut kriteria yang dijabarkan oleh (William Dunn, 2019) mengenai indikator mengevaluasi Kebijakan.

1. Efektivas

Apabila desa mengikuti ketentuan kriteria dari pemerintah, melakukan pendataan yang transparan, adil dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum maka desa dapat menentukan sendiri calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020, dijelaskan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan Untuk Pendudukan Miskin yang bersumber dari Dana Desa. Hal ini selaras Dengan pertanyaan yang diberikan oleh Basir selaku Kepala Desa Pakatto yang menyatakan bahwa :

“ Mengenai Efektivitas dari kebijakan Pemerintah, kami mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 dan yang menjadi dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan prekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem keuangan, masyarakat desa penerima BLT Dana Desa ini berbeda-beda dan mereka terdata miskin di desa sebelum Covid-19, mereka pada awalnya memiliki banyak kesempatan dalam bekerja, selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Saat pandemi Covid-19 kondisi ekonomi penerima ini menurun penghasilannya, ada yang kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bantuan BLT ini dari dana desa yang aturannya desa boleh mendata untuk siapa saja yang berhak karna kasus Covid-19 itulah adanya BLT ini, ketika Pemerintah buat aturan yang telah ditetapkan. Adapun masyarakat di data dulu, banyak prosesnya kemudian baru kami bisa tentukan siapa yang berhak menerima BLT, pastinya dilihat dulu kondisi masyarakat termasuk miskin dan terdampak Covid-19”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kondisi masyarakat penerima BLT Dana Desa di Desa Pakatto sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 mengalami perbedaan. Sebelum Covid-19, Penerima BLT Dana Desa berkesempatan lebih mudah dalam mencari pekerjaan karena tidak adanya Batasan dalam kegiatan dan batasan berinteraksi, masyarakat selalu berkerja untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun tidak

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

memiliki pekerjaan tetap, tidak berpenghasilan tinggi, dan terdata sebagai masyarakat miskin di desa, mereka masih bisa mencari pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup dari hasil kerjanya sendiri.

Lanjut informan Muyuti selaku sekretaris desa terkait efektivitas program BLT Dana Desa di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, mengemukakan bahwa:

“Sebelum Covid-19 pekerjaanku itu buruh harian lepas, saya sempat punya pekerjaan yang bisa nacukupi kebutuhan hari-hariku. Pekerjaan ku tidak tetap, saya ada kesempatan untuk mencari pekerjaan. Namanya juga buruh apa saja ku kerjakan ji. Sekarang waktu pandemi keadaanku bedami sama yang dulu, sekarang ini setengah mati saya dapat pekerjaan karena jaga jarak, ada peraturan dan sebagainya sehingga penghasilan saya menurun”.

Lanjut informan Muyuti selaku sekretaris desa terkait efektivitas program BLT Dana Desa di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, mengemukakan bahwa:

“Jika dikatakan meringankan beban, ya bisa mi dibilang meringankan, tapi presentasi nya saya yakin kecil, karena kalau menurut saya pribadi berdasarkan survei dan pengalaman pribadi sebenarnya yang terdampak bukan hanya masyarakat saja, ya mohon maaf yang kita-kita sudah terbiasa hidup seperti ini, tapi sebenarnya yang paling terdampak itu pelaku usaha, sekarang coba mi lihat kalau orang desa ada corona atau tidak ada corona tetap ji begini-begini, istilahnya sudah terbiasa hidup susah, taruh lah yang di PHK masih punya tabungan, masih bisa buka usaha kecil-kecilan, tapi kalau yang punya usaha seperti yang kita lihat, seperti warung warung nasi kuning di depan sekolah sampai-sampai tutup karna tidak ada pembelinya.”

Sedangkan menurut Daeng Aksa selaku warga asli Desa Pakatto yang berprofesi sebagai penjual nasi kuning dan penerima BLT Dana Desa sebagai berikut:

“Sebenarnya Program BLT ini lumayan meringankan beban

masyarakat seperti saya ini karna kemarin saya buka usaha nasi kuning awalnya sebelum corona ramai skali karna saya jualan di depan sekolah, tapi pas ada corona mulai sepi karna target penjualan saya itu anak anak sekolah, tapi anak-anak sekolah diliburkan untuk kurangi penyebaran covid, saya syukur Alhamdulillah bisa dapat BLT, untuk buka lagi usaha kalau keadaan sudah membaik”

Sedangkan Menurut warga desa bernama Dg. Januardi selaku warga asli desa Pakatto yang berprofesi penjual sayur di pasar dan sekaligus menjadi penerima BLT Dana Desa mengatakan sebagai berikut:

“awal korona saya tidak khawatir karna masyarakat desa pakatto itu tetap kepasar untuk beli kebutuhan dapur jadi saya tidak ambil pusing soal pandemi kemarin, tapi lama kelamaan ada kebijakan dari pemerintah untuk menjaga jarak, pasar sudah mulai sepi, tapi untuk ada program BLT ini saya masih bisa bertahan untuk berjualan di pasar”

Jadi bisa disimpulkan dari hasil wawancara di atas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sudah meringankan beban masyarakat Desa Pakatto walaupun presentasinya kecil. Masyarakat Desa Pakatto sangat terbantu untuk bertahan dimasa pandemi.

Maka dari itu Program BLT Dana Desa sudah meringankan beban masyarakat di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu, jadi kriteria efektivitas dalam teori evaluasi milik Wiliam Dunn sudah mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah Desa Pakatto dan masyarakat Desa Pakatto terbukti membantu masyarakat berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Desa Pakatto, Sekertaris Desa Pakatto dan warga desa Pakatto, Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sudah mencapai efektivitas.

2. Efisiensi

Efisiensi berkenan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk

menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Dalam Efisiensi kebijakan dapat diukur dengan beberapa indikator dari segi biaya, dari segi waktu, dan segi tenaga.

Pada Program BLT-Dana Desa usaha atau tindakan pemerintah desa agar mencapai tujuan adalah dengan mengalokasikan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kemudian disalurkan ke dana desa yaitu sejumlah Rp. 323.6582.000,00. Serta melakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa yang didapati 128 Kepala Keluarga yang menerima BLT-Dana Desa.

No.	APB-Desa dan Anggaran	
1.	Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa tahun ini	Rp. 1.473.691.732,00
2.	APBD Kabupaten/Kota	Rp. 97.538.410,00
3.	Bantuan Pemerintah Pusat	Rp. 659.779.00,00
4.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 120.322.880,00
5.	Alokasi Dana Desa	Rp. 323.582.000,00
6.	Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat	Rp. 272.396.
7.	Jumlah Belanja Publik/Belanja Pembangunan	Rp. 1.225.631.333,00
8.	Jumlah Belanja Aparatur/Pegawai	Rp. 200.059.236,00

Tabel 4.4 Anggaran Pemerintah Desa Pakatto

Dan dari segi waktu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pakatto Basir menyampaikan Bahwa:

“kalau masalah waktu yang kami gunakan untuk efisiensi dari Program Bantuan Langsung Tunai ini cukup memakan waktu karna pada saat pendataan saja kami pemerintah desa biasanya menghabiskan waktu selama 3 bulan, dan untuk penyaluran bantuan mulai dari tahap satu sampai tiga itu biasanya memakan sembilan bulan lamanya”

Lanjut wawancara dengan informan Muyuti selaku Sekertaris Desa yang biasa menjadi pengawas dalam membagikan BLT untuk masyarakat desa pakatto menyampaikan bahwa:

"kalau masalah tenaga penyaluran dari Bantuan langsung tunai atau dari rangkaian proses program Bantuan Langsung Tunai ini, kami biasanya di bantu oleh teman-teman dari LSM, tenaga mereka yang biasanya dalam penyaluran bantuan itu, kami sebagai pemerintah desa Cuma bisa mengawasi, kalau masalah tenaga kami tidak terbebani karna kami dibantu oleh pihak LSM"

Jadi bisa hasil dari efisensi untuk menghasilkan efektivitas yang di kehendaki dalam mengukur seberapa jauh efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu dari segi Biaya Pemerintah Desa Pakatto mengeluarkan anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 323.582.000,00 yang di peruntukkan kepada masyarakat Desa Pakatto untuk diberikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan yang telah terdata sebanyak 128 Kepala Keluarga. Dan kalau dari segi waktu memang memakan waktu hampir 1 tahun dikerenakan mulai dari proses pendataan masyarakat sudah memakan waktu, dan proses pembagian BLT Dana Desa memakan waktu 9 bulan yang di bagi menjadi 3 tahap dan 1 tahap saja itu 3 bulan. Dan dari segi tenaga pemerintah Desa Pakatto tidak terbebani karena pemerintah desa di bantu oleh LSM.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan, dalam kebijakan public responsivitas diartikan respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran publik atas

mendapat bantuan, jadi diperketat untuk mengukur tingkat kesulitan warga desa dari segi ekonomi, pemerintah desa menerapkan 3 kriteria yang paling signifikan mengukur tingkat kemiskinan warga desa tersebut yaitu penghasilan kurang dari Rp. 600.000, lantai rumah masih tanah, dan mempunyai penyakit kronis yang butuh penanganan setiap harinya.

Setelah menguraikan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan maka peneliti akan menguraikan Analisa sesuai rencana penelitian mengenai evaluasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sebagai jaring pengaman sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Seperti yang telah di uraikan pada hasil penelitian, fokus peneliti terkait dengan evaluasi BLT Dana Desa di Desa Pakatto ini. Sebagaimana dikemukakan oleh willam Dunn bahwa dalam menganalisa kebijakan menggunakan 5 kriteria Evaluasi yaitu, Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, Kecukupan, Pemerataan

NO.	Variable	Uraian
1.	Efektivitas	Program BLT-Dana Desa sudah meringankan beban masyarakat, maka dari itu kriteria efektivitas dalam teori evaluasi milik Dunn sudah mencapai tujuan yang diharapkan, terbukti berdasarkan uraian dan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kelapa Desa dan warga desa Pakatto. Program BLT-Dana Desa sudah mencapai efektivitas.
2.	Efisiensi	Tindakan pemerintah desa agar mencapai tujuan adalah dengan mengalokasikan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kemudian disalurkan ke dana desa yaitu sejumlah Rp. 323.582.000,00. Serta melakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa yang didapati 128 KK yang menerima BLT-Dana Desa
3.	Responsivitas	Dari Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa dan beberapa masyarakat Desa Pakatto yang menerima Program BLT Dana Desa sudah sepenuhnya

		memuaskan target dari kebijakan tersebut karena Sekretaris Desa Muyuti mengakui program ini sangat membantu masyarakat Desa Pakatto dengan respon yang baik dari masyarakat itu sendiri. selain itu penerima BLT Dana Desa ini mempertegas kepuasan mereka dalam menerima BLT Dana Desa ini sangat membantu perekonomian untuk bertahan pada masa pandemi
4.	Kecukupan	hasil dari kecukupan bahwa telah berjalannya Program BLT Dana Desa ini tentang menyelesaikan masalah perekonomian untuk di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu itu sendiri sangat efektif dalam membantu masyarakat. selama proses penyaluran BLT Dana Desa ini masyarakat yang menerima Program BLT Dana Desa ini sangat terbantu, sehingga dengan adanya kebijakan Program BLT Dana Desa ini sudah berjalan dengan baik sepenuhnya
5.	Pemerataan	Presentase dari jumlah Penerima BLT mencapai 28% yang tersalurkan. dapat di simpulkan untuk semua desa dikabupaten Gowa berlaku secara merata dan pembagian untuk program bantuan langsung tunai ini dari pemerintah desa sudah dilakukan semaksimal mungkin agar masyarakat desa pakatto dapat merasakan bantuan dari pemerintah desa Pakatto dan menggunakan bantuan langsung tunai ini dengan maksimal dan untuk memaksimal dalam pemerataan pembagian BLT. Dalam hal ini Program BLT-Dana Desa ini memiliki 14 kriteria namun di Desa Kemlagi hanya menerapkan 3 kriteria yakni pengahsilan 600, lantai rumah masih tanah, dan masyarakat yang mempunyai penyakit kronis sehingga membutuhkan penanganan setiap harinya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat di simpulkan oleh peneliti bahwa adanya program BLT Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ini yang tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat sesuai dengan 5 kriteria evaluasi kebijakan yaitu Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, Kecukupan, dan Pemerataan. Peneliti menyimpulkan bahwa program BLT Dana Desa di Desa

Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa sudah memenuhi kriteria tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui evaluasi program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dapat diambil dari beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut: Evaluasi Program BLT Dana Desa sudah meringankan beban masyarakat, maka dari itu kriteria efektivitas dalam teori milik Dunn sudah mencapai tujuan yang diharapkan, terbukti berdasarkan uraian dan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala efektivitas. Efisiensi tindakan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kemudian di salurkan ke dana desa yaitu sejumlah Rp. 323.582.000,00 serta melakukan pendataan calon penerima BLT Dana Desa yang di dapati 128 orang yang menerima BLT Dana Desa. Kecukupan karena kondisi masyarakat desa Pakatto sendiri sebelum adanya Covid-19 ini juga bisa dikatakan susah sehingga dalam hal ini dengan adanya BLT Dana Desa sudah cukup meringankan prekonomian masyarakat. Pemerataan penerima Program BLT Dana Desa ini memiliki presentase 28% dari total kepala keluarga dan ketetapan dalam hal ini program BLT Dana Desa ini memiliki 14 kriteria namun di Desa Pakatto hanya menerapkan 3 kriteria yakni penghasilan di bawah Rp 600.000.00, lantai rumah masih tanah, dan masyarakat yang mempunyai penyakit kronis sehingga

mebutuhkan penanganan setiap harinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan evaluasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa di desa Pakato kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berikut di kemukakan saran dan masukan.

1. Pemerintah Desa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa diharapkan lebih memperbanyak anggarannya agar masyarakat desa Pakatto yang lebih Kebagian lagi dapan pembagian BLT Dana Desa.
2. Dari permasalahan permasalahan yang ada akibat dari pandemic covid-19 diharapkan masyakat desa pakatto mendapatkan bantuan tidak hanya berbentuk materi tetapi juga berbentuk pemberdayaan masyarakat karna diketahui banyak masyarakat desa pakatto telah kehilangan mata pencariaanya semenjak pandemi ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. D. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Yang terdampak Covid-19 Di Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Prodi Adminitrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan politik, Universitas Kendari, Indonesia.*
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. *CV, PUSTAKA SETIA.*
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan publik.
- Carly, M. (2020). Eektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico.*
- Dewa, M. S. (2011). Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)di Kecamatan Kramatwatu. *Diss. Universitas Sulten Ageng Tirtayasa.*
- Hasbullah, S. A. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Pertam Negeri (SMPN) diKabupaten Pemekesan. 112-122.
- Juaningsih, I. N. (2020). Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *adalah, 4* , 1-2.
- Lubis, S. T. (2007). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. *Kota Medan.*
- Maun, C. E. (2020). Eektivitas Bantuan Langsung Tunai dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Sulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico 9*, 2.
- Moleong, P. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung.*
- Mufida, A. (2020). Polemik pemberian bantuan sosial ditengah pandemi covid-19. *adalah. 1.*
- Nasdian, F. T. (2014). Pengembangan Masyarakat. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia .*
- Pramanik, N. D. (2020). dampak bantuan paket sembako dan bantuan tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid-19. *jurnal ekonomi, sosial & humaniora*, 113-120.
- Ramadhani, A. &. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. 1-12.

RIWAYAT HIDUP



Andi Muhammad Ishaq di lahirkan di Ujung Pandang tanggal 18 Juni 1998, dari pasangan ayahanda Andi Mukaddas dan ibunda Andi Ramlah. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2005 di SD Inpres Minasa Upa dan tamat pada tahun 2011, tamat di SMP Negeri 21 Makassar tahun 2013 dan tamat di SMA Negeri 9 Makassar pada tahun 2016. Setelah itu pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan pada program strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar